



**RANCANGAN**

# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**TAHUN 2021-2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra (Perencanaan Startegis) adalah merupakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra - PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Dharmasraya bertekad menyusun Renstra sesuai dengan tuntutan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Dharmasraya, visi dan misi kementerian terkait serta tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Mudah-mudahan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2021-2026 sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pulau Punjung, 2021

Plt. Kepala Dinas PMD

HASTHO KUNCORO, M.Pd

NIP.19730301 199801 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar belakang .....	1
I.2. Landasan Hukum .....	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan	3
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PMD	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	8
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD	15
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PMD.</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD	17
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	19
3.4. Telaahan Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	21
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	24
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas PMD	25
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>27</b>

<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....</b>	<b>28</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELNGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP.....</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas PMD melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain : perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau saat ini disebut Perangkat Daerah (PD) dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Dinas PMD memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan strategis tingkat perangkat daerah yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Adapun sistematika, tata cara dan tahapan penyusunan renstra berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan

Perubahan Renstra PD terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra PD
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra PD
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
- 4) Penetapan Renstra PD

Di setiap tahapan penyusunan renstra PD ini telah berpedoman pada tahapan-tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, sehingga dokumen RPJMD dan Renstra PD saling terintegrasi dan terdapatnya konsistensi antar kedua dokumen tersebut.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam masa lima tahun, Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya sebagai OPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga diwajibkan menyusun Renstra Badan dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 56 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2016 tentang rincian tugas Dinas PMD, maka pelaksanaan Rancangan Renstra Badan dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

Landasan Operasional :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- g. Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra PMD ini yaitu untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD dengan mempedomani tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra ini sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas PMD
2. Mendorong penguatan fungsi Dinas PMD sebagai institusi perencana daerah
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas PMD
4. Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 serta tujuan pembangunan provinsi tahun 2021-2026

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renstra-PD.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas PMD, Kinerja Pelayanan Dinas PMD dan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Dinas PMD, telaahan Renstra Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan Dinas PMD disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif, kelompok sasaran.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini merupakan bab tambahan untuk mengemukakan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tingkat perangkat daerah yang telah berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun

2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Perubahan Renstra Dinas PMD ini akan digunakan untuk penyusunan Renja Dinas PMD tahun-tahun berikutnya, dan pada akhir periode RPJMD, Renstra Dinas PMD ini sebagaimana RPJMD juga akan digunakan sebagai penyusunan Renja masa transisi Dinas PMD.

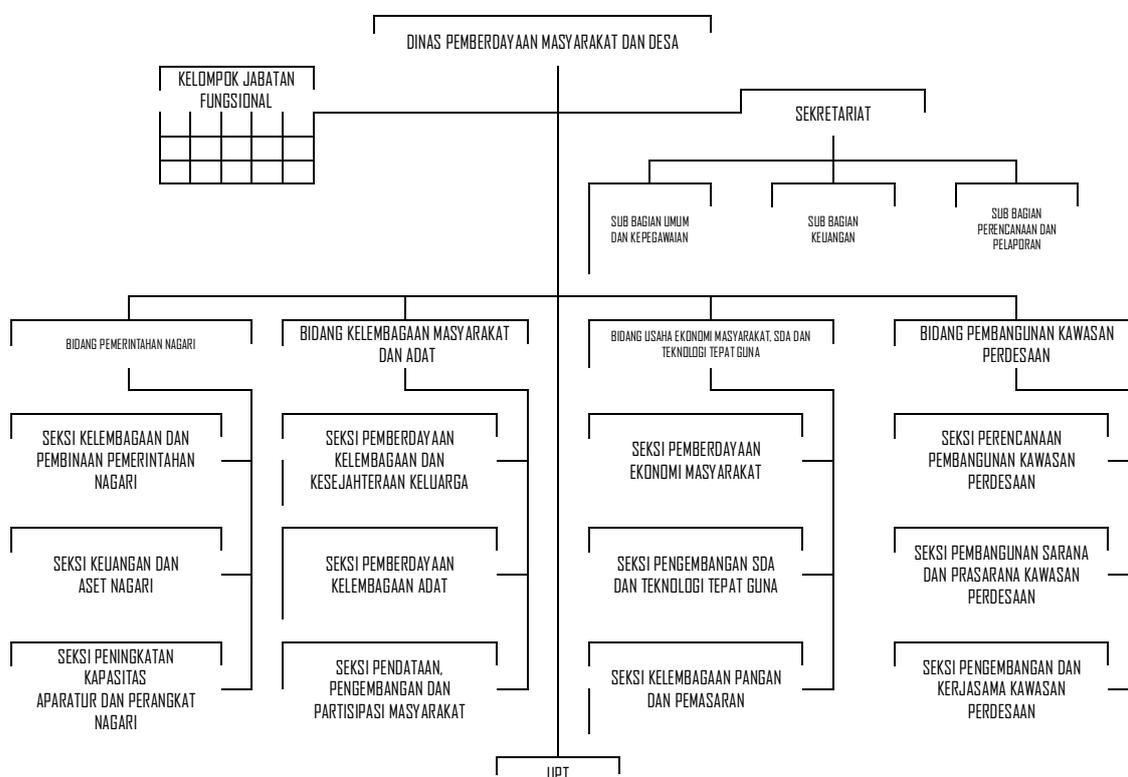
## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa di singkat dengan DPMD Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan perda tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Tipe A melaksanakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Gambar 1. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021



##### 1) Kepala Dinas PMD

Tugas dari Kepala DPMD adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas-tugas lain yang

diberikan atasan. Adapun tugas tugas lain tersebut diantaranya merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemerintahan Nagari, Kelembagaan Masyarakat dan Adat, Uuasaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2) Sekretaris Dinas PMD

Sekretaris DPMD bertugas membantu Kepala dan dalam menyelenggarakan pelayanan teknis administratif. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretaris dibantu oleh 3 Kasubag, yaitu Kasubag umum dan kepegawaian, Kasubag keuangan, dan kasubag program dan pelaporan.

3) Kepala Bidang Pemerintahan Nagari

Kepala Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi Pemerintahan Desa/Nagari, serta Kelembagaan Pemerintahan Nagari. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Kabid. Pemerintahan Nagari dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasi, yaitu Kepala Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Pemerintahan Nagari, Kepala Seksi Keuangan dan Aset Nagari dan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perangkat Nagari.

4) Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasi, yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Keluarga Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Kepala Seksi Pendataan, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat

5) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA Dan Teknologi Tepat Guna

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, serta Kelembagaan Pangan dan Pemasaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan Teknologi Tepat Guna dibantu oleh 3 (Tiga) orang Kasi, yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kepala Seksi Pengembangan SDA dan Teknologi Tepat Guna, Kepala Seksi Kelembagaan Pangan dan Pemasaran

- 6) Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan serta pembangunan kerja sama Kawasan Perdesaan, Dalam melaksanakan tugasnya Kabid Pembangunan Kawasan Perdesaan dibantu oleh 3(Tiga) orang Kasi, yaitu Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, dan Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Kawasan Perdesaan.

## 2.2. Sumber Daya DPMD

Keadaan SDM DPMD Kab.Dharmasraya tahun 2019 menurut tingkat pendidikan, tingkat pangkat/golongan ruang kepegawaian dan tingkat jabatan dapat dilihat dalam Tabel I, Tabel II dan Tabel III.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Kualifikasi pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pasca Sarjana	5 Orang
2	Sarjana	15 Orang
3	Diploma	5 Orang
4	SMA/Sederajat	-
	Jumlah	25

**Tabel 2.3**

Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan kebutuhan pegawai

No	Pangkat/Golongan	Jumlah tersedia (orang)	Jumlah yang dibutuhkan (orang)
1	Esselon II	-	1
2	Esselon III	5	5
3	Esselon IV	14	15
4	Staf/ Fungsional Umum	Belom ada	-
5		5	22
	Jumlah	24	40

Sumber daya manusia yang dimiliki Bappeda Kabupaten Dharmasraya saat ini terdiri dari 25 orang yang berstatus PNS serta didukung oleh 3 personil pegawai tidak tetap (PTT)/sukarela, sedangkan untuk jabatan fungsional perencana belum ada.

### 2.3. Kinerja Pelayanan DPMD

Secara umum DPMD Kabupaten Dharmasraya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis kesatu tahun 2020, realisasi pencapaian kinerja tahun 2020.

**TABEL 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke satu**

No	Indikator Kinerja	2019		2020			Target Renstra 2021	% Capaian tahun 2020 terhadap tahun
		Realisasi	% Capai	Target	Realisasi	% Capaian		

			an			n		akhir renstra 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentasen agari tertinggal dan sangat tertinggal	19,23	80,03	15,38	7,69	150%	11.54	133,36
	<i>Jumlah Nagari Tertinggal dan Sangat Tertinggal</i>	12		8	4		6	
	<i>Jumlah Nagari Seluruhnya</i>	52		52	52		52	
Rata-Rata Capaian Sasaran (Nilai Mean)								92,5 (sangat Berhasil)

Capaian persentase nagari yang tertinggal pada tahun 2020 adalah sebesar 150%. Jumlah Desa/Nagari tertinggal didasarkan dari Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kemnetrian Desa, DTT dan Transmigrasi. Untuk Realisasi ketercapaian tahun 2020 didasarkan pada IDM tahun 2020. Pembinaan terhadap Pemerintahan Nagari berupa Sosialisasi dan pembinaan terhadap Peraturan – Peraturan Pembangunan di nagari. Hal ini dilakukan juga pendampingan kepada Nagari dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban.

Masalah yang dihadapi pada umumnya minimnya kapasitas Perangkat Nagari, sehingga sulitnya memahami pelaksanaan pembangunan nagari dan belum mengutamakan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Capaian Kinerja untuk mengurangi Nagari yang tertinggal dan sangat tertinggal sebesar 150% ( Sangat berhasil). Jumlah Nagari yang mempunyai status sangat tertinggal sebanyak 3 nagari tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 0 nagari. Sedangkan nagari yang tertinggal pada tahun 2019 sebanyak 9 nagari dan pada tahun 2020 turun menjadi 4 nagari, yaitu Lubuk karak, Lubuk Besar, Banai, dan Bonjol.

### Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No	Indikator Kinerja	2019		2020			Target Renstra 2021	% Capaian tahun 2020 terhadap tahun akhir renstra 2021
		Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase profil nagari yang dimanfaatkan dalam pembangunan	86,54	115	96,15	100	104%	100	100
	<i>Jumlah Nagari yang memanfaatkan profil dalam membangun nagari</i>	45		50	52		52	
	<i>Jumlah nagari seluruhnya</i>	52		52	52		52	
Rata-rata capaian (Nilai Mean)								92,5 (Sangat Berhasil)

#### **Persentase Profil Nagari yang dimanfaatkan dalam pembangunan Nagari**

Capaian persentase profil nagari yang dimanfaatkan dalam pembangunan Nagari pada tahun 2020 adalah sebesar 104 %. Profil Nagari ini merupakan program yang mewajibkan Nagari dalam pengelolaan Data Nagari melalui Program Prodeskel untuk pembangunan dan dapat diinformasikan dan diakses oleh masyarakat melalui dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator tersebut di atas mengukur berapa persentase profil yang dibuat oleh Pemerintah Nagari menjadi panduan dalam pembuatan perencanaan nagari baik RPJM Nagari dan RKP nagari serta penyusunan Proposal pembangunan kepada Pemerintah Pusat maupun pihak ke tiga yang akan membantu dalam pembangunan Nagari. Dari 52 Nagari yang menyusun RPJM dan RKP nagari, semua nagari memakai Profil Nagari

sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan perencanaan. Selain untuk dasar penyusunan perencanaan pembangunan nagari, profil Nagari selalu di update secara online melalui Website [prodeskel.binadesa.kemedagri.go.id](http://prodeskel.binadesa.kemedagri.go.id).

Masalah yang dihadapi pada umumnya minimnya kapasitas Perangkat Nagari/operator Nagari dan juga ada beberapa Nagari yang belum ada jaringan internet/sinyal internet.

### Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No	Indikator Kinerja	2019		2020			Target Renstra 2021	% Capaian tahun 2020 terhadap tahun akhir renstra 2021
		Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase nagari memiliki BUM-Nag aktif	100	113	94,23	100	106	100	100
	<i>Jumlah Nagari yang miliki Bum nag aktif</i>	52		52	52		52	
	<i>Jumlah Nagari seluruhnya</i>	52		52	52		52	
	Persentase Kelompok PKK yang aktif	100	100	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah Kelompok PKK yang aktif</i>	64		64	64		64	
	<i>Jumlah kelompok PKK seluruhnya</i>	64		64	64		64	
	Persentase posyandu yang aktif	41,46	81,9	52,65	100	189	55,10	181
	<i>Jumlah posyandu yang aktif</i>	246		251	251			

	Jumlah posyandu seluruhnya	246		251	251		251	
	Rata-rata nilai tertimbang		98,3			131,6		
Rata-rata capaian (Nilai Mean) (								92,5 (Sangat berhasil)

Capaian Pemberdayaan sosial, ekonomi dan adat dalam pembangunan nagari dengan capaian 131,6%, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5. Sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat berperan dan mendukung pembangunan di nagari. Sasaran strategis ke tiga ini didukung dengan indikator kinerja berikut ini:

### 1. Jumlah BUMNag yang aktif

Untuk mewujudkan indikator jumlah BUMNag yang aktif ini didukung kegiatan pendukung, yaitu pembinaan terhadap BUMNag dilaksanakan untuk agar berjalan dengan baik. Pengurus BUMNag pada umumnya belum mempunyai pengalaman dan minimnya kapasitas. Untuk itu DPMD melakukan pembinaan tersebut dengan mendampingi dalam proses Pendirian secara Sah secara administrasi dan pengelolaan kelompok Usaha.

Masalah yang dihadapi pada umumnya minimnya kapasitas pengurus BUMNag sehingga perkembangan hasil usaha BUMNag masih relatif rendah. Selain itu adanya kejadian Pandemi membuat dana untuk kegiatan dipotong sehingga sulit untuk melakukan pembinaan

### 2. Persentase Kelompok PKK yang berperan dalam Pembangunan Nagari

Untuk mewujudkan sasaran strategis ketiga ini didukung kegiatan pendukung, yaitu :

1. Pendampingan kepada Pemerintah Nagari dalam Pelatihan Pemberdayaan kader PKK bersumber dana desa .
2. Melaksanakan pembinaan kader- kader PKK secara berkelanjutan oleh tim penggerak PKK Kabupaten.

Masalah yang dihadapi pada umumnya minimnya kapasitas PKK Nagari dan Upaya yang dilakukan adalah:

1. Pembinaan dan pendampingan di Nagari dalam pelatihan pemberdayaan Kader PKK di Nagari.
2. Mengkoordinasikan dengan DPMD provinsi dalam penyertaan LPM kabupaten Dharmasraya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan DPMD Provinsi Sumatera Barat.
3. **Persentase Strata Posyandu yang Mandiri**

Untuk mewujudkan sasaran strategis ketiga ini didukung kegiatan pendukung, yaitu : Pendampingan kepada Pemerintah Nagari dalam Pelatihan Pemberdayaan kader posyandu bersumber Alokasi dana desa dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Masalah yang dihadapi pada umumnya minimnya kapasitas Kader Posyandu Nagari dan belum kuatnya kelembagaan Pokjanel Posyandu, dan upaya yang dilakukan

1. Pembinaan dan pendampingan di Nagari dalam pelatihan pemberdayaan pokjanel/ posyandu di Nagari.
2. Mengkoordinasikan dengan DPMD provinsi dalam penyertaan Kader Posyandu kabupaten Dharmasraya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan DPMD Provinsi Sumatera Barat.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya**

Permasalahan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pada DPMD Kabupaten Dharmasraya merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Secara alamiah permasalahan yang ada di pengaruhi oleh faktor faktor internal maupun eksternal. Permasalahan internal bersumber pada adanya kelemahan dalam ketersediaan dan pendayagunaan sumber daya pada DPMD Kabupaten Dharmasraya sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemberian pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan faktor eksternal terjadi karena adanya potensi ancaman dari lemahnya sumber daya dan kelembagaan baik dari stake holder maupun dari masyarakat yang tidak terantisipasi sebagai masalah dalam kehidupan sosial.

##### **2.4.1 Tantangan yang berasal dari Faktor Internal .**

Permasalahan yang mempengaruhi dalam pemberian pelayanan pada DPMD Kabupaten Dharmasraya yang berasal dari Faktor Internal

adalah sebagai berikut :

1. Belum terbangunnya Kantor atau Gedung DPMD Kabupaten Dharmasraya.
2. Rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengawai DPMD Kabupaten Dharmasraya baik dari tingkat pendidikan dan keterampilan keahlian yang dimiliki.
3. Terbatasnya Anggaran dan Asset yang di kelola oleh DPMD Kabupaten Dharmasraya

#### **2.4.2 Tantangan yang berasal dari Faktor Eksternal.**

Permasalahan yang mempengaruhi dalam pemberian pelayanan pada DPMD Kabupaten Dharmasraya yang berasal dari Faktor Eksternal sebagai berikut :

##### **1. Pemberdayaan Masyarakat.**

Permasalahan yang mempengaruhi pemberian pelayanan pada DPMD Kabupaten Dharmasraya dari faktor eksternal di bidang pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Dharmasraya.
- b. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Dharmasraya yang masih rendah.
- c. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- d. Rendahnya Kinerja kelembagaan masyarakat.
- e. Rendahnya kinerja kelembagaan ekonomi masyarakat
- f. Kurangnya penerapan teknologi tepat guna .
- g. Rendahnya pemanfaatan potensi dan sumber daya desa.

##### **2. Pemerintahan Nagari**

Permasalahan yang mempengaruhi pemberian pelayanan pada DPMD Kabupaten Dharmasraya dari faktor eksternal di bidang pemerintahan desa dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Rendahnya sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa.
- b. Banyaknya desa yang belum mempunyai kantor desa.

- c. Rendahnya sumber pendapatan dan anggaran desa.
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang terbatas.
- e. Rendahnya kinerja pelayanan publik pemerintahan desa.

#### **2.4.3 Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD Kab. Dharmasraya.**

Peluang pengembangan pelayanan DPMD Kabupaten Dharmasraya dengan mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki DPMD Kabupaten Dharmasraya baik peluang yang berasal dari faktor internal maupun yang berasal dari faktor eksternal, diantaranya adalah :

- a. Komitmen dan regulasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan dikeluarkannya Perbup Kabupaten Dharmasraya Nomor 40 tahun 2016 tentang Pembentukan DPMD Kabupaten Dharmasraya.
- b. Komitmen dan orientasi kerja seluruh pegawai DPMD Kabupaten Dharmasraya.
- c. Dukungan anggaran operasional, program dan kegiatan DPMD Kabupaten Dharmasraya.
- d. Dukungan, potensi dan sumber daya kelembagaan masyarakat.
- e. Dukungan potensi dan sumber daya aparatur dan pemerintahan desa.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT**  
**DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah**

Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

**Tabel.3.1**  
**Permasalahan pelayanan Dinas PMD**

No	Indikator	Interpretasi	permasalahan	Faktor penentu keberhasilan/ tindak lanjut
1	Persentase Nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Rendahnya RPJM/RKP Nagari Berbasis IDM	Masih Rendahnya kapasitas perangkat nagari	- Kemampuan perangkat nagari yang tinggi - Peningkatan kapasitas perangkat Nagari
2	Persentase APB Nagari Berbasis IDM	Rendahnya APB Nagari yang Berbasis IDM	Masih rendahnya kemampuan perangkat nagari dalam menyusun APB	Peningkatan kapasitas perangkat Nagari
3	Persentase Keuangan Nagari Berbasis Siskeudes Online	Belum terlaksana Siskeudes berbasis online	Kualitas jaringan internet yang belum merata.	-Peningkatan sarana dan prasarana -peningkatan kapasitas perangkat nagari
4	Persentase Nagari Yang Memiliki BumNag Berkembang	Rendahnya perkembangan BUMNag	Kualitas SDM yang masih rendah	-Bantuan Permodalan untuk BumNag -Peningkatan kapasitas pengurus bumNag
5	Jumlah BumNag Bersama	Belum terbentuknya BumNag Bersama	Belum ada regulasi tentang bumNag bersama	-fasilitasi pembentukan bumNag bemsama -membuat regulasi bumNag bersama

6	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Peran LKN yang belum belum maksimal	Masih rendahnya kapasitas kader-kader LKN	-Peningkatan kapasitas kader
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	Belum terwujudnya kerjasama nagari	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang kerjasama nagari	-membuat regulasi -melakukan fasilitasi kerjasama nagari

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih

#### 3.2.1. Visi

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Kabupaten Dharmasraya) Tahun 2021 - 2026 yaitu: “ **Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya**”.

#### 3.2.2. Misi

Berdasarkan visi dijelaskan di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. **Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memiliki peran dalam pencapaian misi ke empat. Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya berupaya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan Nagari mandiri

sebagai bagian dari upaya memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasiskan kearifan lokal di tingkat Nagari, seperti pada table di bawah ini:

<b>VISI</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya</b>			
<b>MISI</b>	<b>Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien</b>			
<b>No</b>	<b>Sasaran/Program</b>	<b>Permasalahan Pelayanan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	- Kurangnya potensi nagari - Rendahnya kapasitas perangkat nagari dalam pelayanan masyarakat	Masih kurangnya kapasitas perangkat nagari dalam pelayanan masyarakat	potensi ketahanan sosial yang baik dengan tingginya kemajuan masyarakat dan kegotongroyongan
2	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga	Belum adanya realisasi kerjasama antar nagari	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang kerjasama.	- adanya fasilitasi dari kerjasama oleh pemerintah daerah.

### **3.2. Telaahan Renstra K/L (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) dan Renstra Dinas PMD Provinsi Sumbar**

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara OPD daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi (OPD terkait). Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI),

dan 1 (satu) OPD Provinsi yang terkait, yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sumatera Barat.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Dharmasraya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan yaitu Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong pembangunan desa.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes & PDTT RI) Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Terwujudnya desa Berkembang dan Mandiri;
2. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas;
2. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan
3. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan kawasan Pedesaan
4. Meningkatnya Pendayagunaan SDA dan TTG di pedesaan

Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

SASARAN K/L DINAS PROV. SUMBAR	PERMASALAHAN DPMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1. Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas	a. Minimnya kapasitas aparatur pemerintahan yang terampil	a. koordinasi internal yang belum optimal	a. berbagai peraturan perundang undangan yang mendukung pelaksanaan tugas DPMD Kabupaten Dharmasraya
2. Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan	b. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Nagari	b. Sarana prasarana pendukung yang belum memadai	
3. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan kawasan Pedesaan	c. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari	c. Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal	b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dalam pembinaan terhadap Nagari/kel
4. Meningkatnya Pendayagunaan SDA dan TTG di pedesaan	d. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat Nagari yang belum maksimal	d. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang belum optimal	
	e. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan	e. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari	c. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat Nagari
		f. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah	
		h. Minimnya pemberdayaan lembaga social budaya dan adat.	

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama sebagai lindung atau budidaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian

terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya, mengingat bahwa dalam satu ruang yang digunakan terdapat para pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah. Dalam Tabel 3.4 di bawah ini, didiskripsikan bahwa pola struktur ruang dititik beratkan Pusat Kegiatan Wilayah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dan Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan dan Pernagarian, dimana peningkatan infrastruktur dasar permukiman masih menjadi prioritas dalam pengembangan tata ruang wilayah di Kabupaten Dharmasraya

Tabel 3.4.

Keterkaitan Rentra Dinas PMD Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

RTRW KABUPATEN DHARMASRAYA 2011-2031	RENSTRA DINAS PMD 2021-2026
Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan pusat-pusat perdagangan.	Pemberdayaa dan penguatan lembaga ekonomi nagari ( BUMNag)
Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata.	Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya melalui LKAM, KAN dan Kader Pemberdayaan dan nagari wisata
Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan sistem transportasi dengan mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten; interaksi dengan wilayah tetangga; mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata; menyediakan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan pernagarian; menyediakan pelayanan persampahan kawasan perkotaan; menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman	Peningkatan sarana dan prasarana pernagarian dan kawasan pernagarian

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya antara lain memprioritaskan pada (1) pengembangan kawasan pernagarian, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah di Kabupaten Dharmasraya, yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan pernagarian; (2) peningkatan kualitas kawasan permukiman pernagarian. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan

fungsinya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2018 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), bahwa dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masih ada dua indikator TPB yang belum mencapai target TPB yaitu : Jumlah Nagari Tertinggal dan Jumlah Nagari Mandiri, dan Indikator TPB yang belum terlaksana (tidak ada data) terkait dengan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.

Perumusan arah kebijakan dalam pencapaian target sebagaimana yang diformulakan oleh TPB tersebut, sebagai OPD penanggung jawab dalam pemenuhan target dimaksud, maka arah kebijakan dilaksanakan dalam kerangka peningkatan sistem tata kelola pembangunan nagari dan meningkatkan peluang kerja dan kesempatan berusaha penduduk miskin di daerah tertinggal.

Secara umum pencapaian peningkatan IDM di Kabupaten Dharmasraya sudah menuju ke arah yang lebih baik dimana sejak diluncurkannya Indeks Dema Membangun ini tergambar progress dan pencapaian sebagai berikut :

#### Perkembangan Nilai IDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks	Status Desa					Jumlah
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
2016	0,5851	8	21	18	5	0	52
2017	0,5851	8	21	18	5	0	52
2018	0,6364	7	6	32	7	0	52
2019	0,6587	3	9	30	10	0	52
2020	0,6953	0	4	28	16	4	52

Indikasi program yang akan dituangkan untuk menyelesaikan permasalahan indikator yang belum mencapai target tersebut yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM Nagari  
Dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN), Pembinaan BUMNag.
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana dan Aset Desa

Dengan melakukan pembinaan perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan dan aset nagari

3. Pengembangan Regulasi Sistem Tata Kelola Pembangunan Nagari
  - Untuk penyusunan RKP Nagari
  - Penetapan pengurus BUMNag

### **3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis**

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya dan Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, serta permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya .

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya dan telaahan RTRW dapat disimpulkan keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya dengan isu - isu strategis yang ada sebagai berikut:

- (1) Percepatan Pembangunan Nagari dan Pembentukan serta Pengembangan Kawasan perdesaan.;
- (2) Banyaknya Lembaga Ekonomi yang ada di nagari Sebagai Potensi Ekonomi yang Perlu Disinergikan dan Dikuatkan agar Berdaya Saing;
- (3) Implementasi UU tentang Nagari perlu didukung Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang Memadahi;
- (4) Partisipasi Masyarakat dan Swadaya Masyarakat dalam Membangun Nagari; serta
- (5) Nilai-nilai Sosial Budaya dan Semangat Kegotongroyongan Menurun.
- (6) Belum tercapainya target penurunan Jumlah desa tertinggal.
- (7) Belum tercapainya target peningkatan Jumlah Desa Mandiri.
- (8) Tidak ada data Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan sebagai bagian dari penjabaran visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni:

**Tabel 4.2**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	
	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nag berbasis IDM	0	11,59	17,31	76,92	86,54	100	
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekonomi		Persentase APB nagari berbasis IDM	0	0	11,58	17,31	76,92	86,54	
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi?lingkungan		Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	50	57,69	67,31	76,92	86,59	100	
				Persentase nagari memiliki bumrag berkembang	23,08	25,00	26,92	28,85	32,69	34,62	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	86	88	90	92	94	96	
				Meningkatkan kerjasama antar	Jumlah Bumrag Bersama	0	1	2	3	4	5

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
			nagari dan atau pihak ketiga	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	0	2	4	4	6	6
			Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas PMD	B	B	B	B	BB	BB

## BAB V

### STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, adalah sebagaimana berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya</b>			
<b>MISI</b>	<b>Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien</b>			
<i>TUJUAN</i>	<i>INDIKATOR TUJUAN</i>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	-Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan nagari -Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat -Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga ekonomi nagari	-Peningkatan tata kelola pembangunan nagari, perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan. -Pembinaan dan peningkatan kapasitas LKN -Pembinaan BUMNag dan fasilitasi pendirian BUMNag bersama
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekonomi			
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga	Meningkatkan Kerjasama dan kawasan perdesaan	-Fasilitasi kerjasama nagari -Pembinaan penyusunan tata ruang kawasan perdesaan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan, maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab untuk diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas PMD dalam hal memiliki 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Selanjutnya secara detil program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagaimana terlampir dalam Tabel 6.1 pada lampiran.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendorong tercapainya Sasaran RPJMD tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya mengupayakan melalui Indikator Kinerja PD. Adapun Indikator Kinerja PD adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1.  
Sasaran, Indikator, dan Target kinerja**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nag berbasis IDM	0	0	11,59	17,31	76,92	86,54	100
		Persentase APB nagari berbasis IDM	0	0	0	11,58	17,31	76,92	86,54
		Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online		50	57,69	67,31	76,92	86,59	100
		Persentase nagari memiliki bumrag berkembang	21,15	23,08	25,00	26,92	28,85	32,69	34,62
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	84	86	88	90	92	94	96
	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga	Jumlah Bumrag Bersama	0	0	1	2	3	4	5
		Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	0	0	2	4	4	6	6
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas PMD	B	B	B	B	B	BB	BB

Berdasarkan table di atas bahwa indikator sasaran pada tahun awal RPJMD (2020) terdapat data yang belum diukur sebelumnya.

